

# PERAN DARI UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN ETNIS TAMIL DI SRI LANKA

I Putu Agung Wira Sudewa, Ni Wayan Rainy Priadarsini,  
A.A. Bagus Surya Widya Nudraha,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Email: wirasudewa@yahoo.co.id,  
rainypriadarsini@yahoo.com, aabasuwinu@gmail.com

## ABSTRACT

*This research aims to answer research question about the role of United Nations Development Programme to eradicate poverty on Tamil ethnic. The aspect of poverty eradication is seen from peace building viewpoint. This research uses qualitative method to analysis data. All data source from this research is secondary source that got mainly from news, book, and e-book. The finding of this research is the role of poverty eradication that UNDP was implemented using people centered-development approach. Besides that UNDP is also prioritize gender empowerment in every aspect of their programs. Overall the program that UNDP has done is quite success to eradicate poverty but this program was less successful in addressing the root of discrimination.*

**Keywords :** *Tamil ethnic, poverty, peace building, people centered development, UNDP*

## 1. PENDAHULUAN

Persoalan *peace building* atau pembangunan damai pasca konflik menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional. Persoalan ini menjadi sangat signifikan dikarenakan *peace building* dianggap sebagai sebuah metode untuk mengatasi dampak buruk dari suatu konflik.

Tercatat telah ada 19 misi *peace building* yang dilakukan oleh PBB ke negara-negara *post-conflict* selama selang waktu 1989-2004 (Zurcher, 2013). Salah satu negara *post-conflict* yang pernah menjalani misi *peace building* adalah Sri Lanka.

Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di sebelah selatan India. Negara ini memiliki dua etnis besar yaitu etnis Sinhala dan Tamil (Swearer, 1991). Mayoritas etnis Sinhala adalah penganut Agama Buddha Theravada dan etnis Tamil mayoritas menganut Agama Hindu (Cheetham, Pratt, dan Thomas, 2013). Etnis Sinhala adalah etnis yang memegang kendali atas pemerintahan Sri Lanka yang berpusat di Kolombo, sementara etnis Tamil mayoritas mendiami Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka.

Semenjak Sri Lanka merdeka dari Inggris tahun 1948, Pemerintah Sri Lanka banyak menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tamil (Wilson, 2000). Kebijakan diskriminatif yang diterapkan

oleh Pemerintah Sri Lanka inilah yang pada akhirnya memicu konflik dengan etnis Tamil.

Puncaknya terjadi pada tahun 1976 dengan terbentuk organisasi yang bernama Macan Pembebasan Tamil Eelam/ *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) atau yang lebih dikenal di dunia internasional dengan sebutan Macan Tamil (*Tamil Tigers*). Tujuan didirikannya Macan Tamil adalah untuk membentuk negara merdeka di Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka (Sukarjaputra, 2010). Dalam mewujudkan tujuannya itu, Macan Tamil melakukan beragam aksi, mulai dari bom bunuh diri, penyanderaan, hingga konflik terbuka dengan tentara Pemerintah Sri Lanka.

Beragam upaya damai telah dilakukan untuk mengakhiri konflik ini. Namun, semua upaya yang dilakukan selalu berakhir dengan jalan buntu. Pada tahun 2009, tentara Sri Lanka memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran ke markas Macan Tamil yang berpusat di wilayah Hutan Mullaitivu. Hasilnya pimpinan Macan Tamil, Velupillai Prabhakaran tewas dalam operasi tersebut (Sukarjaputra, 2010). Tewasnya Prabhakaran merupakan sebuah akhir dari konflik panjang yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun antara Macan Tamil dan Pemerintah Sri Lanka.

Pasca berakhirnya konflik bersenjata di Sri Lanka, dampak sosial saat konflik tidak serta merta hilang. Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah masalah kemiskinan dikalangan etnis Tamil yang mayoritas bermukim di wilayah Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka.

Data dari Remnant dan Cader (2008) menunjukkan pendapatan rumah tangga rata-rata per bulan pada tahun 2002 untuk Provinsi Utara dan Timur adalah Rs. 8.155 (US\$ 2,04/hari) dan Rs. 7.640 (US\$ 1,91/hari), sangat jauh dari rata-rata pendapatan nasional yang mencapai Rs. 12.803 per bulan (US\$ 3,20/hari). Lima puluh persen rumah tangga di Provinsi Utara dan Timur menerima kurang dari Rs. 5.858 per bulan (US\$ 1,46/hari) dan Rs. 5.500 per bulan (US\$ 1,37). Guna mengatasi persoalan kemiskinan tersebut, banyak lembaga internasional yang fokus pada program *peace building* berdiri di Sri Lanka.

Salah satu lembaga yang melakukan program *peace building* di Sri Lanka adalah United Nations Development Programme (UNDP). UNDP merupakan salah satu badan PBB yang bermarkas besar di New York, Amerika Serikat. Di Sri Lanka UNDP meluncurkan program *socio-economic recovery* sebagai bagian dari program transformasi pasca konflik.

Sasaran utama dari program *socio-economic recovery* ini adalah etnis Tamil yang bermukim di wilayah Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka. Etnis Tamil yang mayoritas bermukim di wilayah tersebut memiliki tingkat perekonomian yang jauh lebih rendah daripada etnis Sinhala. Jika kesenjangan sosial antara etnis Tamil dan Sinhala dibiarkan, maka bukan tidak mungkin konflik yang sama dapat muncul lagi. Maka peran dari UNDP dalam hal ini sangat penting mengingat menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan terjadinya *positive peace* (keadaan dimana keadilan, dialog dan kerjasama terjadi).

Selama program ini dilaksanakan dari tahun 2008-2012 banyak kemajuan yang telah dicapai. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain, seperti dibangunnya beragam infrastruktur-infrastruktur dasar dan penyaluran kredit usaha guna membantu penduduk Tamil yang miskin. Usaha-usaha yang dilakukan oleh UNDP membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan peran yang dilakukannya dalam proses

penanggulangan kemiskinan pasca konflik di wilayah Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama yang dikaji adalah penelitian yang dilakukan oleh Phillipia Haden dan Samil Faltas (2004) dengan judul, *Assessing and reviewing the impact of small arms projects of arms availability and poverty: a case study of the Republic of Congo: UNDP/IOM Ex-combatant Reintegrating and Small Arms Collections projects*. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai peran UNDP dalam proses *peace building* di Kongo. Peran yang dilakukan oleh UNDP adalah mengurangi jumlah kepemilikan senjata para eks-kombatan dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat lewat beragam program bantuan ekonomi. Program bantuan ekonomi yang diberikan diharapkan akan mengurangi kemiskinan di antara para eks-kombatan dan membuat mereka tidak lagi berperang melawan pemerintah.

Penelitian kedua adalah penelitian dari Basil Van Horen (2002) dengan judul, *Planning for Institutional Capacity in War-Torn Area: The case of Jaffna, Sri Lanka*. Program ini dilakukan selama 3 tahun. Penelitian yang dilakukan Horen (2002) berfokus pada persoalan pembangunan kapasitas institusi dan pemberdayaan institusi lokal melalui program *Jaffna Reconstruction Project* (JRP). Program ini mendapat dukungan dari *Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit* (GTZ). Dalam penelitian ini Horen berfokus pada aspek bantuan dan desain kelembagaan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh K.B. Thangavel (2012) dengan judul *Post-Conflict Reconstruction: Role of UNDP in Sri Lanka*. dalam penelitian ini dijelaskan mengenai peran yang dilakukan oleh UNDP selama rentang waktu 2006-2009 di Sri Lanka. Dalam penelitian ini Thangavel menyoroti peran UNDP dalam membangun *capacity building*. *Capacity building* adalah peningkatan *skill*, kompetensi, dari suatu masyarakat melalui program pelatihan, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan (Thangavel, 2012). Banyak pihak yang mengapresiasi program

*capacity building* ini dikarenakan memberikan dampak peningkatan *skill* yang berguna bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak besar bagi institusi pemerintahan, seperti kantor catatan sipil dan lembaga kemasyarakatan. Tapi sayangnya program ini belum memberikan hasil maksimal. Hal itulah yang menyebabkan perlunya ada beberapa perbaikan program.

## 2.2. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembangunan berbasis masyarakat. Teori pembangunan berbasis masyarakat adalah salah satu teori ekonomi-politik internasional. Fokus utama dari pendekatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui *self-reliance*, *social-justice*, dan *participation* (Korten, 1990). Teori ini lahir sebagai kritik atas pandangan umum yang menyebutkan sumber dari kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi. Faktanya banyak pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak merata dan justru menimbulkan ketimpangan sosial (Baylis dan Smith, 2001).

Menurut Theresia dkk, (2014), teori pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat menekankan pada penggunaan sumber daya lokal. Peran pemerintah dan NGO penggiat pembangunan dalam perspektif teori pembangunan berbasis masyarakat hanyalah sebagai edukator, konsultan, dan fasilitator. Pandangan yang dibawa oleh teori ini adalah masyarakat miskin memerlukan mekanisme penanggulangan kemiskinan yang sifatnya komprehensif.

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh David Korten yang merupakan seorang penasehat pada U.S. Agency for International Development pada tahun 1984. Korten menyatakan pertumbuhan ekonomi yang berfokus kepada strategi pembangunan konvensional (mengikuti model Rostow) adalah sifatnya tidak berkelanjutan dan berkeadilan. Ia kemudian menyampaikan bahwa harus dilakukan transformasi dalam hal institusi, teknologi, nilai, dan tingkah laku pihak-pihak yang melakukan pembangunan (Korten, 1990). Puncaknya terjadi pada

tahun 1989, dengan dibentuknya *The Manila Declaration on People's Participation and Sustainable Development sets forth principles and guidelines for enacting these transformations*. Dengan munculnya deklarasi ini teori pembangunan berbasis masyarakat mulai dipakai oleh banyak institusi global dalam program kerjanya.

Ada tiga elemen penting dari teori ini yaitu *sustainability*, *participation*, dan *justice* (Korten, 1990). *Sustainability* dalam konteks ekonomi berarti penggunaan sumber daya secara efisien agar generasi sekarang dan masa mendatang bisa memanfaatkannya terus (Theresia dkk, 2014). Konsep keberlanjutan berusaha menegaskan arti penting lingkungan dalam bidang ekonomi. Manakala suatu negara yang hanya mengejar pertumbuhan melalui eksploitasi tanpa memperhatikan dampak lingkungannya, maka dampak buruk yang ditimbulkan dari eksploitasi tersebut justru jauh lebih besar.

*Participation* mengandung makna keikutsertaan seseorang untuk mengambil bagian dari kegiatan di dalam masyarakat (Theresia dkk, 2015). Partisipasi dilakukan dalam tiga hal yaitu dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan. Partisipasi yang dilakukan haruslah melalui sinergitas tiga pihak yaitu pemerintah, NGO, dan masyarakat. Derajat partisipasi menjadi salah satu penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.

*Justice* dalam konteks ini mengandung makna keadilan dalam memperoleh sumber-sumber ekonomi dan memanfaatkannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup (Korten, 1990). Ada tiga indikator dari *justice* yaitu 1) *local ownership*; kepemilikan aset-aset produksi bagi masyarakat lokal. 2) kedaulatan masyarakat; hal ini berarti masyarakat berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keberlanjutan. 3) *Employment and income generation* berarti adanya penciptaan lapangan kerja dalam suatu masyarakat lokal. Penciptaan lapangan kerja ini juga haruslah diikuti dengan adanya pembagian pendapatan yang sesuai, sehingga keuntungan dari pemanfaatan sumber daya dapat dinikmati oleh banyak orang.

## 2.3. Kerangka Konseptual

### 2.3.1. Sustainability

Pada tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* melakukan sebuah konferensi penting sebagai tindak lanjut dari pemikiran Meadow. Dalam konferensi tersebut dirumuskan bahwa: *sustainability is one that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own need* atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.

Ada tiga kriteria dari konsep berkelanjutan menurut Korten (1994): 1) tidak adanya pemborosan sumber daya alam; 2) tidak ada dampak buruk bagi lingkungan; 3) kegiatannya harus berorientasi pada daur ulang sumber daya alam. Senada dengan konsep diatas Sutamiharja (2004) mengemukakan bahwa sasaran dari keberlanjutan itu sendiri ada enam yaitu: 1) pemerataan hasil pembangunan; 2) pengamanan terhadap kelestarian; 3) pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam; 4) mempertahankan kesejahteraan rakyat; 5) mempertahankan manfaat pembangunan; 6) menjaga mutu dari pembangunan.

### 2.3.2. Participation

Partisipasi merupakan aspek penting lainnya yang dalam teori pembangunan konvensional sering tidak mendapat tempat. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat diarahkan untuk ikut terlibat dalam penyelesaian masalah kemiskinan yang selama ini mereka hadapi.

Menurut Eriscon (1994), bentuk partisipasi dalam program pembangunan ada tiga yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan  
Partisipasi dalam proses ini maksudnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana dan strategi jalannya program
2. Partisipasi dalam pelaksanaan  
Partisipasi dalam model ini berarti pelibatan masyarakat dalam suatu program kerja atau proyek. Bentuk partisipasinya bisa dalam bentuk tenaga, uang, atau barang

materian yang berguna untuk pembangunan.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan  
Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan masyarakat dalam mendukung keberadaan proyek yang telah dibangun. Masyarakat diajak untuk ikut serta merawat dan mengoperasikan hasil pembangunan melalui uang dan tenaga secara bersama-sama.

### 2.3.3. Justice

Justice dalam hal ini diartikan sebagai keadilan dalam memperoleh sumber daya ekonomi yang diperlukan bagi masyarakat dalam program pembangunan. Prinsip ini berperan untuk menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama dalam program pembangunan. Ada empat prinsip keadilan menurut Theresia (2004) dalam program pembangunan:

1. Perlakuan yang sama bagi semua orang dan kelompok orang dalam proses pembangunan
2. Adanya distribusi manfaat dari pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan
3. Adanya peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk tetap memperoleh manfaat pembangunan
4. Adanya kompensasi yang manusiawi apabila pembangunan mengakibatkan dampak buruk bagi sekelompok orang.

### 2.3.4. Peace Building

*Peace* dalam pandangan Johan Galtung terbagi menjadi dua. Galtung dalam Susan (2010) menjelaskan dua pengertian dari *peace* yaitu *positive peace* dan *negative peace*. *Negative peace* adalah perdamaian yang dicirikan dengan: 1) Perlindungan dari aksi kekerasan; 2) Adanya proteksi oleh masyarakat dan kepastian hukum; 3) Adanya pengakuan dalam hubungan sosial; 4) Terjadinya akomodasi dan penerimaan. Sementara itu, *positive peace* adalah perdamaian yang dicirikan dengan: 1) Adanya pemberian akses kesejahteraan; 2) Pemberian akses hukum dan keamanan; 3) Akomodasi dan keadilan sosial; 4) Kesetaraan dan persatuan dalam masyarakat. Dapat dilihat

dari pengertian ini bahwa kata *peace* memiliki dua makna yang sangat luas.

Dengan munculnya dua pengertian perdamaian ini, maka definisi lama soal *peace* yaitu keadaan tidak ada perang dinilai kurang tepat. Hasilnya terjadi perubahan paradigma dalam banyak organisasi internasional dalam melihat *peace* itu sendiri. Jika sebelumnya hanya dikenal istilah *peace keeping* dan *peace making*, maka pada tahun 1970 muncul istilah *peace building*. Istilah ini pertama kali disampaikan oleh sosiolog Johan Galtung. Menurut Johan Galtung, *peace building* adalah pembentukan struktur perdamaian guna mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi "akar penyebab" kekerasan dan mendukung kapasitas masyarakat lokal untuk pengelolaan perdamaian dan resolusi konflik (Murithi, 2009). Boutros Ghali (Mantan Sekjen PBB) menjelaskan *peace building* sebagai tindakan untuk membangun dan mendukung struktur-struktur yang dapat mencegah timbulnya konflik di masa yang akan datang (Murithi, 2009).

Organisasi internasional yang menjalankan program *peace building* pada umumnya akan melakukan beberapa peran. Peran-peran yang dilakukan sangat tergantung dengan dimensi *peace building* yang sesuai dengan bidang tugas yang diembannya. Peran dari suatu organisasi internasional dalam hal *peace building* ada lima yaitu peran dalam hal *security and rule of law, political and governance, socio-economic recovery, human rights, dan humanitarian assistance* (ACCORD, 2013). Dalam tulisan ini peran yang ingin diteliti adalah peran *socio-economic recovery*. Peran ini penulis nilai paling tepat untuk menggambarkan upaya UNDP dalam menanggulangi kemiskinan di Sri Lanka.

Tabel.2.3.4.1 Dimensi dan Indikator Peace Building

Dimensi	Indikator
<i>Socio-economic Recovery</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Reconstructed physical infrastructure</i></li> <li>• <i>Employment and livelihood generation</i></li> <li>• <i>Develop private sector</i></li> <li>• <i>Efficient natural resources</i></li> </ul>

	<p><i>management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Equitable and fair resources allocation</i></li> <li>• <i>Creation markets, banking and financial institutions</i></li> </ul>
--	--

(Sumber: ACCORD Peace Building, 2013 dengan beberapa perubahan)

### 2.3.5. Kemiskinan

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti menyangkut kemiskinan. PBB bahkan memiliki dua definisi kemiskinan yaitu *income poverty* dan *human poverty* (Weisfell dkk, 2008). *Income poverty* atau kemiskinan pendapatan adalah kemiskinan yang didasarkan pada jumlah uang yang dimiliki.

Menurut World Bank (2008), orang yang pengeluarannya kurang US\$ 1,25 per hari tergolong dalam kelompok yang mengalami kemiskinan ekstrim, sementara orang-orang yang pengeluarannya kurang dari US\$ 2 per hari tergolong kelompok miskin moderat ("povert overview," n.d. para. 2-3). Sementara itu, kebalikan dari *income povert* adalah *human poverty* atau kemiskinan kemanusiaan. *Human poverty* mendasarkan seseorang miskin atau tidak miskin tidak hanya pada satu indikator saja melainkan menggunakan banyak indikator.

Terdapat delapan indikator yang harus terpenuhi agar seseorang dianggap tidak miskin. Kedelapan Indikator tersebut lazimnya disebut dengan istilah *basic needs*. Menurut Anu Madgavar dkk (2014) indikator dari terpenuhinya *basic needs* antara lain: makanan yang mengandung 60 gram protein dan 40 gram lemak/hari bagi orang dewasa, energi yang dapat digunakan untuk memasak dan menyalakan listrik berdasarkan kebutuhan minimal, rumah permanen yang dapat ditinggali, air minum bersih dan dapat diakses melalui sambungan pipa, sanitasi yang bersih, adanya layanan kesehatan yang mudah diakses, pendidikan minimal pada jenjang SD dan SMP, dan adanya jaminan sosial melalui asuransi.

## 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deksriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif menurut Nawawi (2007) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Menurut Burhan Bungin (2011) metode ini digolongkan sebagai metode kuasi kualitatif atau kualitatif semu karena masih menempatkan teori sebagai aspek utama untuk menganalisis data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan website-website di internet.

Unit analisis adalah obyek yang perilakunya akan kita deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan (Mas'ood, 1994). Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu UNDP. Dipilihnya unit analisis organisasi dikarenakan unit analisis inilah yang penulis nilai paling dapat untuk menggambarkan peran dari sebuah lembaga.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter dan metode penelusuran data online. Dalam penelitian ini strategi analisis yang digunakan adalah strategi analisis data deskriptif-kualitatif. Metode ini merupakan metode analisis yang bersifat semi-deduktif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan teori sebagai sarana untuk mengklasifikasikan data. Data-data yang telah terklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis secara induktif. Hasil dari analisis induktif tersebut barulah melahirkan sebuah kesimpulan (Bungin, 2012).

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyajian data tematik. Teknik penyajian data tematik adalah teknik penyajian data dengan cara mengelompokkan setiap data yang ada dalam tema-tema tertentu.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Penelitian

#### 4.1.1. Kemiskinan Etnis Tamil di Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka

Secara demografis, Sri Lanka adalah negara multikultur. Ada beragam etnis yang mendiami wilayah ini. Menurut Badan Pusat Statistik Sri Lanka (2012) terdapat 7 etnis yang berdiam di Sri Lanka.

Ketujuh etnis tersebut antara lain: Sinhala, Tamil Sri Lanka, Moor Sri Lanka, Tamil India, Melayu Sri Lanka, dan Moor India. Secara komposisi Sinhala dan Tamil adalah etnis terbesar dengan komposisi masing-masing 74,90% dan 15,27% (Tamil Sri Lanka dan Tamil India).

Dua kelompok etnis ini juga terpisah secara geografi. Etnis Sinhala mendiami sebagian besar kawasan selatan dan barat pulau, sementara etnis Tamil mendiami kawasan utara dan timur pulau. Secara statistik jumlah etnis Tamil yang mendiami Provinsi Utara dan Timur masing-masing sebesar 93,86% dan 39,79% dari keseluruhan populasi (BPS Sri Lanka, 2012).

Selain perbedaan dalam hal geografi, dua kelompok etnis ini juga berbeda dalam hal ekonomi. Etnis Sinhala yang merupakan etnis terbesar di Sri Lanka memiliki pendapatan yang jauh lebih besar ketimbang etnis Tamil. Hal tersebut tercermin dari distribusi pendapatan provinsi di Sri Lanka. Provinsi yang mayoritas dihuni oleh etnis Tamil memiliki pendapatan yang rendah. Hal tersebut bertolak belakang dengan Provinsi Barat dan Selatan yang mayoritas dihuni oleh etnis Sinhala. Etnis Sinhala justru dapat menikmati pendapatan yang jauh lebih besar.

**Tabel 4.1.1.1. Pendapatan Rata-Rata Provinsi di Sri Lanka**

Provinsi	Rata-Rata Pendapatan
Western	Rs. 64,944
Central	Rs. 38,558
Southern	Rs. 41,816
<b>Northern</b>	<b>Rs. 37, 503</b>
<b>Eastern</b>	<b>Rs. 28, 113</b>
North Western	Rs. 46,253
North Central	Rs. 35,771
Uva	Rs. 40,664
Sabaragamuwa	Rs. 36,379
<b>Rata-rata Nasional</b>	<b>Rs. 41.111</b>

(Sumber: BPS Sri Lanka, 2012)

Provinsi Utara dan Timur memang merupakan salah satu provinsi paling miskin di Sri Lanka. Data dari badan pusat statistik Sri Lanka pada tahun 2012 menunjukkan. Pendapatan rata-rata di Provinsi Utara (Rs. 37, 503) dan Provinsi Timur (Rs. 28, 113). Sangat jauh dari rata-rata pendapatan nasional yang mencapai Rs. 41.111. Hanya provinsi Sabaragamuwa yang memiliki pendapatan rata-rata lebih

rendah dari dua Provinsi Utara dan Timur. Penyebab Provinsi Sabaragamuwa lebih rendah pendapatannya lebih dikarenakan faktor geografis wilayahnya yang gersang dan tidak banyak dihuni penduduk. Hal tersebut sangat berbeda dengan Provinsi Utara dan Timur yang miskin karena dampak dari konflik.

**Tabel 4.1.1.2. Rasio Konsumsi Makanan**

Provinsi	Rasio Konsumsi Makanan
Western	30,6%
Central	41,2%
Southern	37,8%
<b>Northern</b>	<b>44,8%</b>
<b>Eastern</b>	<b>55,0%</b>
North Western	41,3%
North Central	41,1%
Uva	41,7%
Sabaragamuwa	43,2%
<b>Rata-rata Nasional</b>	<b>37,6%</b>

(Sumber: BPS Sri Lanka, 2012)

Data menunjukkan penduduk Provinsi Utara menghabiskan sekitar 55,0% dari pendapatannya, sementara penduduk Provinsi Timur menghabiskan 44,8% dari pendapatannya untuk konsumsi makanan. Hal tersebut adalah tanda dari adanya kemiskinan. Seperti yang dijelaskan oleh Kuncoro (2012), bahwa suatu masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk tabungan dan investasi. Kuncoro (2010) menjelaskan dengan tidak adanya investasi dan tabungan maka peluang untuk terciptanya kesejahteraan dalam suatu masyarakat akan menjadi lebih kecil (Kuncoro, 2012). Hal ini dikarenakan tidak terjadinya arus perputaran modal dalam sektor produktif (Williamson, 1995).

Persoalan perang yang memicu kemiskinan menyebabkan populasi etnis Tamil terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1901, jumlah etnis Sinhala mencapai 2.330.800 orang atau 65,36% dari total populasi dan etnis Tamil Sri Lanka mencapai 951.700 orang atau 26,69% dari total populasi (BPS Sri Lanka, 2012). Pada tahun 2011 jumlahnya etnis Sinhala mencapai 15.250.081 orang atau 74,90% dari total populasi, sementara etnis Tamil berjumlah 2.269.266 orang atau 11,15% dari total populasi (BPS Sri Lanka 2012).

Adanya perubahan demografi yang cukup signifikan tidak lain disebabkan oleh rendahnya angka reproduksi dikalangan etnis Tamil (Chattopadhyaya, 1994).

Persoalan rendahnya reproduksi ini seperti yang dijelaskan oleh Chattopadhyaya (1994) disebabkan oleh suasana perang berkepanjangan yang berlangsung di Provinsi Utara dan Timur. Perang tersebut mengakibatkan banyak anak-anak muda Tamil yang tidak menikah dan memilih menjadi pejuang Macan Tamil. Selain itu, banyak juga orang-orang Tamil yang memilih mencari suaka ke Inggris dan Australia (Swamy, 2010).

Selain persoalan yang menyangkut masalah ekonomi, Provinsi Utara dan Timur juga mengalami persoalan pendidikan yang buruk. Tercatat sebanyak 40% anak muda Tamil tidak dapat melanjutkan pendidikan menengah dikarenakan masalah ekonomi (ADB, 2009). Selain itu, tidak adanya guru yang terlatih juga menjadikan dua provinsi ini memiliki masalah dalam hal baca dan tulis. Sekitar 20% penduduk Tamil yang berusia 12 tahun masih belum bisa membaca dan menulis (ADB, 2009).

Persoalan kesehatan di Provinsi Utara juga tidak terlalu baik, pada tahun 2012 hanya ada 2 rumah sakit. Dengan jumlah yang sangat terbatas dua rumah sakit tersebut harus melayani penduduk yang jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang. Hal tersebut berimplikasi kepada munculnya beragam gejala penyakit seperti demam berdarah. Selain itu, lebih dari setengah populasi balita Tamil menderita gizi buruk (ADB, 2009).

Persoalan-persoalan ini yang jika tidak ditangani secara tepat tentu akan menimbulkan dampak berantai baru. Maka dari itu diperlukan yang namanya *promoting and social reconstruction*. Tujuannya adalah untuk menghapus hambatan-hambatan ekonomi yang menyebabkan seseorang tidak mampu hidup sejahtera. Sasaran utama dari program ini adalah menanggulangi kemiskinan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang krusial karena akan mencegah timbulnya kembali pemberontakan dan menyatukan kelompok yang bertikai agar menggunakan cara-cara politik yang baik (Collier dalam Murithi, 2009).

#### 4.1.2. Faktor Penyebab Kemiskinan Etnis Tamil di Provinsi Utara dan Timur

Permasalahan kemiskinan yang saat ini menimpa etnis Tamil tidak dapat dilepaskan dari persoalan diskriminasi dan konflik berkepanjangan yang terjadi di Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka menerapkan aturan yang bersifat diskriminatif dalam hal ekonomi dan politik bagi etnis Tamil. Dalam hal politik, etnis Tamil dilarang untuk menduduki jabatan strategis pemerintahan dan mendirikan partai politik. Sementara itu, dalam hal ekonomi etnis Tamil dipersulit untuk mendirikan usaha dan melakukan kegiatan perdagangan dengan sesama etnis mereka yang berasal dari India (Sukarjaputra, 2010).

Diskriminasi yang dialami oleh etnis Tamil pada akhirnya memicu gerakan separatis yang dikenal sebagai Macan Tamil. Macan Tamil bertujuan untuk mendirikan negara baru di Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka. Gerakan ini direspon oleh Pemerintah Sri Lanka dengan jalan menggelar operasi militer. Konflik berkepanjangan selama kurang lebih 30 tahun pun tidak dapat dihindarkan. Dampak dari konflik itu sendiri adalah rusaknya beragam infrastruktur dan kemiskinan yang menimpa etnis Tamil.

Hubungan harmonis antara Sinhala dengan Tamil mulai retak ketika Perdana Menteri Solomon Bandanaikie mengeluarkan kebijakan diskriminatif yang disebut "Sinhala Only Act" pada tahun 1956. Kebijakan ini mengharuskan semua orang agar bisa berbicara Bahasa Sinhala. Hal tersebut berdampak kepada banyaknya orang Tamil yang harus memundurkan diri dari pemerintahan karena tidak bisa berbahasa Sinhala. Etnis Tamil pun banyak melakukan gerakan protes atas kebijakan ini, sementara etnis Sinhala yang merasa diuntungkan memilih untuk melakukan gerakan anti-Tamil. Pada tahun 1959 terjadi kerusuhan besar antara Tamil dengan Sinhala. Kerusuhan ini menewaskan ribuan orang dan pada akhirnya berdampak kepada instabilitas politik di Sri Lanka.

Pada tahun 1972 Perdana Menteri Sirimavo Bandaranaike mengganti nama Ceylon menjadi Sri Lanka dan menjadikan Buddha Theravada sebagai agama resmi negara. Kebijakan tersebut juga disusul dengan beragam kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak dan keistimewaan bagi etnis Sinhala dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Banyak hak-hak eksklusif

seperti mendirikan pabrik dan bank hanya diberikan pemerintah bagi etnis Sinhala (Peebles, 2006). Etnis Tamil Sri Lanka juga dilarang melakukan kegiatan perdagangan dengan sesama rekan etnis mereka yang berasal dari India. Akibatnya banyak usaha-usaha perdagangan yang tutup, mengingat mata pencaharian sebagai etnis Tamil adalah sebagai pedagang makanan dan pakaian.

Diskriminasi yang terus terjadi membangkitkan kesadaran politik etnis Tamil untuk merdeka. Sekelompok intelektual Tamil kemudian membentuk organisasi yang bernama Macan Tamil Baru pada tahun 1972. Organisasi ini bertujuan untuk membentuk negara merdeka yang bernama Tamil Eelam.

Pada tahun 1976 Macan Tamil Baru berganti nama menjadi Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) yang lebih dikenal di dunia internasional dengan sebutan Macan Tamil.

Macan Tamil dalam menjalankan aksinya tidak segan-segan melakukan kegiatan pembunuhan. Kebanyakan Sasaran Macan Tamil adalah polisi Sinhala dan para politisi Tamil moderat yang bersedia berdialog dengan Pemerintahan Sri Lanka. Operasi besar pertama yang dilakukan oleh Macan Tamil adalah membunuh Walikota Jaffna, Alfred Duraiappah, pada tahun 1975. Operasi pembunuhannya lainnya menimpa M. Canagaratman yang merupakan anggota parlemen Sri Lanka.

Pembunuhan yang paling memicu kemarahan etnis Sinhala atas Macan Tamil adalah pembunuhan yang mereka lakukan terhadap 13 tentara Sri Lanka. Pembunuhan ini berdampak pada munculnya kerusuhan besar di Sri Lanka yang membangkitkan sentimen anti-Tamil secara luas. Etnis Sinhala menyerang desa-desa yang dihuni oleh warga Tamil. Peristiwa yang berlangsung pada Bulan Juli 1983 dikenal sebagai peristiwa "Juli Hitam". Dampak dari peristiwa ini adalah terbunuhnya 3000 orang.

Dunia internasional menyebut peristiwa Juli Hitam sebagai sebuah genosida yang direncanakan pemerintah Sri Lanka. Pasca peristiwa Juli Hitam semakin banyak aksi saling serang antara Macan Tamil dengan Pemerintah Sri Lanka. Pada tahun 1987 pemerintah Sri Lanka menggelar operasi pembebasan wilayah yang dikuasai oleh Macan Tamil.

Pertempuran tersebut bertujuan untuk merebut wilayah Vadamarachchi. Operasi ini menandai dimulainya perang konvensional pertama antara militer Sri Lanka dengan Tentara Macan Tamil.

Perang di Sri Lanka yang terus berkecamuk membuat kondisi perpolitikan di Asia Selatan semakin tak menentu. India yang merupakan negara terbesar di Asia Selatan akhirnya turun tangan dengan menerjunkan Indian Peace Keeping Force (IPKF) Tahun 1987. Terbentuknya IPKF tidak dapat dilepaskan dari desakan warga Tamil Nadu yang menginginkan India membantu etnis Tamil di Sri Lanka. Kedatangan IPKF tidak dapat meredakan konflik yang melibatkan antara Sinhala dengan Macan Tamil. Justru IPKF dianggap sebagai sebuah masalah baru bagi dua pihak yang sedang bertikai. Masalah yang muncul seperti gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan dan kesalahan kalkulasi IPKF dalam memperhitungkan kekuatan Macan Tamil, sehingga mengakibatkan banyak korban tewas dari pihak India (Holt, 2011)

Sebuah kesepakatan antara Pemerintah Sri Lanka dengan Pemerintah India yang pada intinya memberikan status otonomi khusus bagi etnis Tamil di wilayah Jaffna ditolak mentah-mentah oleh Macan Tamil. Macan Tamil beralasan pemberian otonomi khusus akan membatasi ruang gerak Macan Tamil. Selain itu ketidakpuasan juga datang dari etnis Sinhala yang melihat hal ini sebagai keberpihakan pemerintah Sri Lanka atas Macan Tamil.

Ketika Renasinghe Premadasa menggantikan Jayawardane sebagai Presiden Sri Lanka. Ia meminta agar pemerintah India mengakhiri IPKF di Sri Lanka pada tahun 1990. India pun menyetujui dengan alasan telah banyak tentaranya yang tewas. Velupillai Prabhakaran, pimpinan Macan Tamil, melihat hal tersebut sebagai sebuah keberpihakan India atas Pemerintah Sri Lanka. Prabhakaran pun mengutus pasukan bunuh diri untuk membunuh Perdana Menteri India Rajiv Gandhi Tahun 1991. Tidak cukup hanya dengan membunuh Rajiv Gandhi, Macan Tamil juga membunuh Presiden Sri Lanka Renasinghe Premadasa Tahun 1993. Banyaknya serangan yang dilakukan oleh Macan Tamil menjadikan organisasi ini lebih dijuluki sebagai organisasi teroris ketimbang

kelompok separatis oleh dunia internasional (Sukarjaputra, 2010).

Segala bentuk upaya mediasi yang dipelopori oleh lembaga internasional selalu berakhir dengan kegagalan. Mediasi hanya sebatas melahirkan gencatan bersenjata jangka pendek. Fase terakhir dari konflik berkepanjangan ini mulai tampak pada tahun 2008-2009, kala itu tentara Sri Lanka mengintensifkan serangan udara dan darat ke markas Macan Tamil di Mavil Aru. Hasilnya pemimpin Macan Tamil tewas dalam serangan berskala besar yang dilakukan oleh militer Sri Lanka.

## 4.2. Hasil Temuan dan Analisis

### 4.2.1. Peran UNDP

UNDP Sri Lanka dalam pelaksanaannya berbasis kepada UNDP Country Programme Action Plan (CPAP) yang merupakan program transisi/pemulihan yang berfokus kepada masyarakat yang mengalami dampak dari konflik yaitu masyarakat di Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka (UNDP, 5). UNDP Sri Lanka melaksanakan enam program kerja yang bersifat *peace building*. Keenam program kerja ini sifatnya merupakan program *peace building* yang berfokus dalam bidang ekonomi.

Keenam program tersebut antara lain: 1) *sustainable livelihood*; 2) *micro finance and micro enterprise development*; 3) *community focused housing*; 4) *rehabilitation of community infrastructure*; 5) *social transformation and gender empowerment*; 6) *community based environmental management*. Hasil yang diharapkan dari terlaksananya keenam program kerja tersebut adalah terjadinya kohesi sosial dan pemulihan ekonomi dalam masyarakat yang berkonflik (UNDP, 2011).

#### 4.2.1.1. Sustainable Livelihood

Program ini adalah program penciptaan lapangan pekerjaan yang berbasis sumber daya lokal. Kebanyakan sektor usaha yang dikembangkan adalah perikanan, pertanian, dan peternakan. Masyarakat yang menjadi sasaran utama dari program ini adalah rumah tangga miskin etnis Tamil yang selama ini terkena dampak dari konflik bersenjata. Tujuan dari program ini adalah agar pendapatan rumah tangga miskin etnis Tamil mampu

meningkat secara berkelanjutan. Hasil temuan dalam program ini antara lain:

1. Keberadaan program ini telah menciptakan akses mata pencaharian yang lebih besar bagi masyarakat. Akses tersebut antara lain dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Bidang-bidang tersebut memang memang menjadi salah satu penyumbang terbesar dari PDB Sri Lanka. Pihak-pihak yang menerima manfaat sebanyak 15.000 orang dengan komposisi 39% perempuan.
2. Guna menunjang keberlanjutan dari program ini UNDP memberikan bantuan mesin-mesin pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan agar ongkos produksi dapat diturunkan dan produk yang dihasilkan bersifat kompetitif di pasaran.
3. Pemberian pelatihan atau *training* dalam bidang pertanian. Hal ini dimaksudkan agar proses pertanian dapat dilakukan secara profesional dan mampu memberikan keuntungan bagi petani. Jumlah orang yang mengikuti program kerja ini adalah sebanyak 7.711 orang. UNDP melakukan kerjasama dengan dinas pertanian Sri Lanka dan NGO lokal seperti dalam memberikan pelatihan.
4. UNDP menjalin kerjasama dengan 56 lembaga pemerintahan di Sri Lanka agar masyarakat Tamil dapat menikmati infrastruktur dasar yang mendukung mata pencaharian mereka. Program ini difokuskan pada daerah-daerah terpencil yang ada di Provinsi Utara dan Timur Sri Lanka.

#### 4.2.1.2. Micro Finance and Micro Enterprise Development

Program *micro finance and micro enterprise* adalah penciptaan unit-unit usaha kecil pada bidang keuangan dan perdagangan. Dalam program ini UNDP memberikan bantuan berupa hibah dan memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat memberikan nilai tambah atas usaha yang

dijalankannya. Kegiatan yang dijalankan kebanyakan merupakan kegiatan usaha yang mengembangkan hasil dari produk-produk pertanian, perikanan, dan peternakan yang telah ada. Hasil temuan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Jumlah penerima dalam sektor ini mencapai 682 orang. Kebanyakan penerima merupakan orang-orang yang mengembangkan usaha pengolahan dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Sebanyak 95% dari para penerima langsung berinisiatif mendirikan usaha dalam waktu 3 bulan semenjak menerima bantuan hibah. Jumlah penerima hibah terbesar adalah kamu wanita dengan persentase 56%.
2. Sebanyak 2603 pemuda Tamil dilatih pada pembuatan perencanaan bisnis. Program ini bernama Start Your Business (SYB) dan Improve Your Business (IYB). Kegiatan pelatihan yang dikembangkan bekerjasama dengan Internationa Labor Organization (ILO). Bank-bank swasta yang berlokasi di wilayah Jaffna dan Batticaloa juga bekerja sama dalam UNDP dalam menyalurkan kredit pasca pelatihan. Jumlah pinjaman yang diberikan berkisar antara Rs. 10.000 dan Rs. 50.000.
3. Pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan pelatihan bagi 11 unit usaha di wilayah Jaffna. Usaha-usaha ini diberikan pelatihan dalam hal manajemen, marketing, dan perizinan usaha dengan pemerintah.

#### 4.2.1.3. Community Focused Housing

*Community focused housing* adalah program penciptaan rumah sederhana bagi para etnis Tamil. Perang yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun telah menyebabkan etnis Tamil tinggal di pengungsian, beberapa diantaranya bahkan ada yang mencari suaka ke luar negeri. Rumah tentu saja menjadi hal yang sangat penting keberadaannya karena menyangkut kebutuhan primer manusia. Hasil temuan terkait community focused housing ini antara lain:

1. Sebanyak 772 rumah layak huni telah dibangun oleh UNDP. Dari jumlah tersebut 96,6% telah dihuni oleh pemiliknya. Kebanyakan rumah yang dibangun terletak di Provinsi Utara 65% dan Provinsi Timur 35%. Kebanyakan rumah etnis Tamil dibangun baru, karena rumah lama mereka telah hancur.
2. Dalam proses pembangunan rumah mereka UNDP melibatkan peran masyarakat tamil. Warga tamil yang berpartisipasi sebanyak 1203 orang. Mereka dilibatkan langsung dalam proses konstruksi.

#### 4.2.1.4. Rehabilitation of Community Infrastructure

Program *rehabilitation of community infrastructure* bertujuan untuk membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat. Infrastruktur dasar yang dibangun seperti jalan, jaringan listrik, air, dan saluran telepon. UNDP mengungkapkan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Utara dan Timur bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan membuat produk-produk yang dibuat warga tamil dapat terjangkau harganya. Hasil dari program tersebut antara lain:

1. Sebanyak 624 sarana penunjang kehidupan telah dibangun dan 385 infrastruktur sosial telah dibangun. Jumlah orang yang menerima manfaat dari program ini sebanyak 230.124 orang.
2. Infrastruktur yang membantu meningkatkan nilai tambah dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan juga menjadi perhatian utama. Dalam bidang peternakan dan industri susu telah dibangun pabrik pengolahan susu yang terletak di distrik Batticaloa, Mannar, dan Vavuniya. Pembangunan pabrik ini menurut UNDP telah meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian di Provinsi Utara. Selain itu, UNDP juga mendorong agar pemasaran susu dapat dilakukan ke industri susu yang ada di Sri Lanka seperti Milk Industri of Lanka Company, Nestle, dan Chemical Industries Colombo.
3. Pembangunan saluran irigasi bagi pertanian di wilayah Provinsi Utara

dan Timur. Selama ini dikarenakan perang yang berkepanjangan, saluran irigasi di Provinsi Utara tidak pernah diperbaiki. Kini UNDP membangun saluran irigasi sebanyak 23 buah dengan total panjang 23 Km.

4. Pembangunan fasilitas sosial yang dapat mendukung kehidupan masyarakat Tamil seperti instalasi pengolahan air, fasilitas pendidikan seperti *preschool* dan sekolah pelatihan guru. Fasilitas kesehatan yang dibangun seperti klinik dan fasilitas jompo.
5. Pembangunan jalan yang menghubungkan antara desa-desa terpencil menjadi perhatian utama UNDP. UNDP selama 5 tahun berhasil membangun jalan sepanjang 84,94 km. Pembangunan jalan ini selain memudahkan akses perdagangan barang juga meningkatkan interaksi dan mobilitas warga antar desa. UNDP beranggapan mobilitas warga menjadi hal yang penting karena akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau sumber-sumber ekonomi.
6. UNDP menggunakan skema *cash fork work* yaitu pemberian uang untuk bekerja dalam proyek-proyek yang dijalankan oleh UNDP. Program *rehabilitation and community infrastructure* merupakan program yang menyerap tenaga kerja paling banyak dalam jangka pendek. Sebanyak 72.715 tenaga kerja tidak terlatih dapat bekerja dalam program-program yang dijalankan oleh UNDP seperti program perbaikan jalan dan irigasi.

#### 4.2.1.5. Social Transformation and Gender Empowerment

Dalam program ini UNDP berusaha memanfaatkan sumber daya lokal yang ada dalam mendukung terjadinya perubahan sosial. Sumber daya lokal yang ditekankan disini adalah lembaga-lembaga lokal. Lembaga-lembaga lokal ini adalah mitra kerjasama utama dari UNDP. Selain itu UNDP juga membuat program khusus bagi wanita. Hasil temuannya adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi perubahan dalam hal pertukaran budaya antar etnik. Masyarakat kini dapat lebih mudah dalam menjangkau wilayah lainnya berkat adanya infrastruktur yang dibangun.
2. Sebanyak 328 organisasi lokal menjalin kerjasama dengan UNDP dalam pelaksanaan program kerjanya. Dari jumlah tersebut 40% adalah lembaga yang dikelola oleh mayoritas perempuan. Lembaga-lembaga tersebut menerima hibah dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatannya.
3. Terjadi diskusi antara lembaga lokal dalam suatu distrik. Mereka mendiskusikan beragam permasalahan yang dihadapi terkait dengan program kerja yang mereka jalankan.
4. UNDP memberikan pelatihan Bahasa Inggris bagi 210 pemuda di 5 distrik. Program ini merupakan kerjasama UNDP dengan British Council.
5. UNDP memberikan pelatihan mediasi bagi lembaga-lembaga sekolah di Sri Lanka. Setidaknya ada 21 sekolah yang dilibatkan. Tujuan dari program ini adalah menanamkan metode mediasi sebagai solusi penyelesaian masalah sejak dari usia dini.

#### 4.2.1.6. Community Based Environmental Management

Dalam program ini UNDP menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. UNDP mendorong setiap lembaga lokal dalam suatu desa menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan maka masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya lokal dengan biaya yang terjangkau. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UNDP membangun sanitasi air dengan teknologi ramah lingkungan di wilayah Polunaruwa dan Trincomalee. Sanitasi air dengan teknologi ramah lingkungan diharapkan dapat menanggulangi krisis air di dua wilayah ini.
2. UNDP melakukan pelatihan terhadap lembaga lokal di bidang pertanian di wilayah Manikkamadu dan Kudivil. Pelatihan yang

diberikan terkait teknik pengolahan tanah dan aspek hukum terkait penebangan hutan.

3. UNDP bekerjasama dengan World Food Programme dalam membangun instalasi biogas di Desa Thirunelvelu, Jaffna. Tujuan dibangunnya instalasi ini adalah untuk menyediakan aliran listrik dan gas yang murah bagi penduduk di desa tersebut.

#### 4.2.2. Tantangan Peace Building Terhadap Etnis Tamil di Provinsi Utara dan Timur

Proses *peace building* dalam hal penanggulangan kemiskinan etnis Tamil tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang ada. UNDP sebagai sebuah organisasi internasional telah menjalankan program *peace building* dengan menekankan nilai-nilai pembangunan berbasis masyarakat.

Model pembangunan ini menekankan pada partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam menyusun program pembangunan. PBB pada awal berdirinya belum mengenal program pembangunan berbasis masyarakat sebagai bagian dari platform penanggulangan kemiskinannya. PBB lebih mengikuti model pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh Rostow (Raharjo, 2012).

Perubahan mulai tampak manakala program pembangunan yang berbasis pertumbuhan ekonomi gagal dalam menanggulangi kemiskinan. Program pembangunan berbasis negara dinilai hanya menciptakan utang dan ketergantungan bagi negara berkembang. Selain itu, pembangunan model ini juga dinilai menciptakan kesenjangan sosial yang luas antar masyarakat. Hal tersebut tentu saja berdampak kepada eksklusifitas kelompok yang memperoleh manfaat dari pembangunan (Raharjo, 2012).

Eksklusifitas dari kelompok yang memperoleh manfaat pembangunan bisa lebih berbahaya jika terjadi dalam sebuah negara yang heterogen dari sisi etnis. Jika ada kelompok etnis yang memperoleh manfaat dalam pembangunan dan kelompok etnis lainnya tidak. Hal tersebut bisa memunculkan kecemburuan sosial dan peluang terjadinya disintegrasi dalam suatu negara. Di negara multietnis, kasus yang muncul biasanya adalah adanya kesengajaan penciptaan diskriminasi

pembangunan atas suatu etnis. Di negara-negara lain diskriminasi inilah yang menjadi pemicu dari konflik etnis berkepanjangan (Gurr, 1994).

Dalam kasus Sri Lanka diskriminasi yang dilakukan diawali dengan pembentukan *Sinhala Only Act* yang disusul dengan diskriminasi pada bidang ekonomi melalui nasionalisasi aset-aset yang selama ini dimiliki oleh penduduk Tamil (Sukarjaputra, 2010). Hasil dari diskriminasi tersebut adalah sebuah perlawanan bersenjata dari kelompok minoritas Tamil. Pasca konflik berakhir sisa-sisa permasalahan yang belum terselesaikan adalah kemiskinan. Menurut Acemoglu dan Robinson (2014), cara satu-satunya agar sebuah masyarakat dapat lepas dari kemiskinan adalah lewat penciptaan institusi ekonomi dan politik yang inklusif. Model institusi inklusif hanya mampu tercipta manakala diskriminasi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Sri Lanka dihapuskan.

Namun, langkah UNDP dalam mendorong *peace building* masih sebatas pembangunan fisik dan belum sepenuhnya mendorong perubahan kelembagaan. Hal tersebut berimplikasi terhadap persoalan diskriminasi ekonomi dan politik yang belum mampu ditangani secara maksimal. Pemerintah Sri Lanka pun tampaknya tidak terlalu memberikan perhatian yang berarti terhadap masalah ini. Justru pemerintah Sri Lanka belum melakukan rekonsiliasi nasional. UNDP pun tidak ada upaya kearah sana. Hal tersebut terlihat dari ketakutan pemerintah Sri Lanka atas etnis Tamil yang kemungkinan masih ingin memberontak (foreignpolicy.com, 2014).

Diskriminasi yang dihilangkan oleh Pemerintah Sri Lanka pun masih sebatas dikembalikannya hak-hak untuk berdagang dan memiliki usaha bagi orang Tamil. Namun, diskriminasi seperti kebebasan mendirikan partai politik dan menjadi anggota parlemen masih sangat susah bagi orang Tamil. Tanpa adanya upaya sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan secara mendasar, program *peace building* yang dilakukan oleh UNDP dan banyak NGO lainnya terancam hanya akan menjadi program yang sifatnya proyek saja.

Dalam temuan penelitian ini, diketahui adanya peran baru yang tidak terdapat dalam teori *peace building* ACCORD. Peran tersebut adalah *gender*

*empowerment*. Ada dua program UNDP yang menekankan aspek gender yaitu *micro finance* dan *social transformation*. Gender suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2010). Dalam program pembangunan, pihak yang dinilai harus mendapatkan manfaat utama dari adanya pembangunan selama ini adalah laki-laki, sementara wanita hanya mengurus "persoalan dapur" saja.

UNDP berusaha menghapus masalah ketimpangan gender ini melalui program pelatihan dan pemberian kredit usaha. Hasil dari program pemberdayaan gender di Provinsi Utara dan Timur juga cukup memuaskan. Banyak wanita yang selama ini tidak bekerja, dapat ikut berpartisipasi dalam program pembangunan melalui unit usaha yang mereka buat. Tentu saja hal tersebut berdampak bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh UNDP telah memberikan efek pemberdayaan yang positif bagi etnis Tamil. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penurunan angka kemiskinan secara kuantitas. Data BPS Sri Lanka (2012) menunjukkan rasio penurunan kemiskinan di Provinsi Utara dan Timur masing-masing mencapai 1,9% dan 3,8% pasca berakhirnya konflik. Hal tersebut ditambah dengan semakin baiknya infrastruktur di Provinsi Utara dan Timur.

## 5. KESIMPULAN

Sebagai sebuah program penanggulangan kemiskinan, UNDP menjalankan program ini dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut terjabarkan melalui enam program yang dijalankan oleh UNDP yaitu 1) *sustainable livelihood*; 2) *micro finance and micro enterprise development*; 3) *community focused housing*; 4) *rehabilitation of community infrastructure*; 5) *social transformation and gender empowerment*; 6) *community based environmental management*. Keenam program ini berusaha untuk mendorong masyarakat agar mandiri (*self-reliance*), mengajak masyarakat aktif dalam program pembangunan (*participation*), dan

membuka keadilan dalam aspek pembangunan (*justice*).

Hasil dari program ini adalah berkurangnya angka kemiskinan yang tampak dari peningkatan lapangan pekerjaan dan mulai dibangunnya beragam infrastruktur di Provinsi Utara dan Timur. Hal tersebut ditambah dengan adanya penurunan penduduk miskin dari yang sebelumnya 12,8% (Provinsi Utara) dan 14,8% (Provinsi Timur) pada tahun 2009 menjadi 10,9 (Provinsi Utara) dan 11,0 (Provinsi Timur) pada tahun 2012 (BPS Sri Lanka, 2010&2013). Namun, persoalan diskriminasi ekonomi yang berpangkal pada masalah politik, justru tidak terlalu disentuh.

Fokus UNDP yang cenderung kepada penyelesaian persoalan di lapangan menyebabkan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lebih menekankan aspek program (proyek), tanpa ada upaya lebih lanjut menyelesaikan masalah lewat jalur-lajur lainnya. UNDP tampak tidak terlalu memperhatikan aspek desain kelembagaan secara makro, seperti reformasi institusi pasca konflik, pengupayaan advokasi hak-hak tamil dan rekonsiliasi secara nasional. Hal tersebut berimplikasi kepada upaya penyelesaian masalah yang hanya berusaha menyelesaikan masalah secara permukaan.

Hal lainnya yang juga penting untuk dicatat adalah adanya akomodasi gender dalam program UNDP. Hal tersebut merupakan suatu hal yang positif mengingat program *gender empowerment* tidak ada dalam konsep *peace building* ACCORD. Dalam pandangan UNDP pembangunan haruslah dinikmati oleh semua, sehingga kesetaraan gender dalam pembangunan menjadi hal yang penting. Ada dua program kerja UNDP yang sangat menonjol nilai gendernya yaitu *micro finance* dan *social transformation*.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- ACCORD. 2013. *Accord peace building handbook*. Mount Edgecombe: ACCORD.
- "A world of development experience,". (n.d.). Dalam *United Nations Development Programme*. Diperoleh dari [http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/about\\_us.html](http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/about_us.html).
- Baylis, J., dan Smith, S. (2001). *The globalization of world politics: An introduction to international relations second edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Bearly, B. (2008). *Separatist movement: Should nations have a right to self-determination*. Washington DC: CQ Press.
- Brown, M.E. (1996). *The international dimension of internal conflict*. Massachusetts: MIT Press.
- Bungin, B. (2012). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cheetham, D., Pratt, D., dan Thomas, D. (2013). *Understanding interreligious relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Cook, T.E. (2003). *Separation, assimilation, or accommodation: Contrasting ethnic minority policies*. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Coser, L. (1959). *The function of social conflict*. Glencoe: Free Press.
- Coser, T., dan Rosenberg, A. (1976). *An Introduction to Internatioanal Politics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dzuveroviv, N. (2012). *Intra state conflict* [PDF]. Diperoleh dari <http://www.csm-fpn.org/wp-content/uploads/2011/12/TPRS-Intra-State-Conflicts.pdf>.
- Gurr, T.R. (1994). *Ethnic conflict in world politics*. Colorado: Westview Press.
- Haden, P., dan Faltas, S. (2004). *Assessing and reviewing the impact of small arms projects of arms availability and poverty: A case study of the Republic of congo: UNDP/IOM ex-combatant reintegrating and small arms collections projects*. Bradford: CICS.
- Horen, B.V. (2002). *Planning for institusional capacity in war-torn are: The case of Jaffna, sri lanka*. Australia: Habitat Internasional.
- Jemadu, A. (2007). Analisis konflik internal dari perspektif ilmu hubungan internasional. Dalam Y.P. Hermawan (Ed), *Transformasi dalam studi hubungan internasional: Aktor, isu, dan metodologi* (hlm. 90). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keohane, R.O. (1989). *International institution and state power: Essays*

- in international relations theory*. Boulden: Westview Press.
- Jackson, R., dan Sorensen, G. (2009). *Pengantar studi hubungan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jones, W.S. (1993). *Logika hubungan internasional: Kekuasaan, ekonomi-politik internasional, dan tatanan dunia 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kapan, A. (2000). Capacity building: shifting the paradigms into practice. *Development in Practice*, 10 (10), 517.
- Korten, D.C. (1990). *Getting to the 21st Century*. W Hartford, CT: Kumarian Press.
- Madgavar, A dkk. (2014). *From poverty to empowerment: India's imperative for jobs, growth, and effective basic services*. London: Mckinsey Global Institute.
- Mas'oed, M. (1994). *Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mercy Corps. (2011). *Peacebuilding through economic development approach*. Oregon: Mercy Corps.
- Murdiyatomoko, J. (2010). *Sosiologi memahami dan mengkaji untuk kelas XI*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Murithi, T. (2009). *The ethics of peacebuilding*. Edinburg: The Edinburg University Press.
- Nawawi, H. (2007). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- "Peace,". (n.d.). Dalam *Online Etymology Dictionary*. Diperoleh dari [http://www.etymonline.com/index.php?term=peace&allowed\\_in\\_frame=0](http://www.etymonline.com/index.php?term=peace&allowed_in_frame=0).
- "Peace,". (n.d.). Dalam *Merriam-Webster*. Diperoleh dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/peace>.
- "povert overview". (n.d.). Dalam *World Bank*. Diperoleh dari <http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>
- Prastowo, A. (2011). *Metode penelitian kualitatif: Dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Remnant, F., dan Cader, A.A. (2008). *The multiple dimensions of child poverty in sri lanka: A literature review*. Homagama: Karunaratne & Sons.
- Sukoda-Parr, S. (2015). *Millennium development goals: For a people centered development agenda?*. London: Routledge.
- Silalahi, U. (2009). *Metode penelitian bidang sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sitepu, P.A. (2011). *Studi hubungan internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarjaputra, Y.R. (2010). *Auman terakhir macan tamil: Perang sipil sri lanka 1976-2009*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Swearer, D.K. (1991). Fundamentalistic movements in theravada buddism. Dalam M.E. Marty dan E. Scott (Eds), *Fundamentalism observed* (hlm. 635). Chicago: The University of Chicago Press.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus bahasa indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Thangavel, K.B. (2012). *Post-conflict reconstruction: The role of UNDP in sri lanka*. Jaffna: Jaffna University.
- Theresia, A., dkk. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2002). *Human development report: Deepening democracy in a fragmented world*. New York: Oxford University Press.
- Webel, C. (2007). Toward a philosophy and metapsychology of peace. Dalam C. Webel dan J. Galtung (Eds), *Handbook of peace and conflict studies* (hlm. 5). Oxon: Routledge.
- Weisfeld dkk. (2008). *Hunger and poverty: Definition and distinction*. New York: The Hunger Project.
- Wilson, A.J. (2000). *Sri lankan tamil nationalism: its origins and development in the 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> centuries*. London: C. Hurst & Co.
- Zurcher, Christoph. (2014). *Costly democracy: Peacebuilding and democratization after war*. California: Stanford University Pr